

PROSEDUR PENYUSUNAN REKONSILIASI FISKAL LAPORAN LABA RUGI UNTUK PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN PADA PT INFINITY GENERAL CONSULTING

Diyah Husnulyati¹

diyahhusnulyati@gmail.com

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Tri Hanani²

trihanani@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur penyusunan rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT Infinity General Consulting. Penelitian dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses penyusunan rekonsiliasi fiskal di perusahaan selama kurang lebih empat bulan. Data diperoleh melalui pengamatan terhadap laporan laba rugi komersial dan dokumen pendukung, serta penelaahan terhadap proses identifikasi akun-akun yang menimbulkan perbedaan fiskal. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data keuangan, penentuan koreksi fiskal positif dan negatif sesuai dengan ketentuan perpajakan, hingga penyusunan laba fiskal sebagai dasar perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Infinity General Consulting telah menerapkan prosedur rekonsiliasi fiskal secara sistematis dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Prosedur tersebut juga didukung oleh proses pengecekan ulang sehingga mampu meningkatkan akurasi perhitungan PPh Badan terutang serta mendukung transparansi pelaporan keuangan.

Kata Kunci: Laporan Laba-Rugi, Pajak Penghasilan Badan, Prosedur Penyusunan, Rekonsiliasi Fiskal

ABSTRACT

This study aims to examine and understand the procedure for preparing fiscal reconciliation of the income statement in calculating Corporate Income Tax at PT Infinity General Consulting. The research was conducted through direct observation of the fiscal reconciliation process at the company over a period of approximately four months. Data were collected through the observation of commercial income statements and supporting documents, as well as a review of the process for identifying accounts that give rise to fiscal differences. The research stages included the collection of financial data, the determination of positive and negative fiscal corrections in accordance with applicable tax regulations, and the preparation of fiscal profit as the basis for calculating Taxable Income. The results of the study indicate that PT Infinity General Consulting has implemented fiscal reconciliation procedures in a systematic manner and in compliance with prevailing tax regulations. These procedures are also supported by a review process that enhances the accuracy of Corporate Income Tax payable calculations and promotes transparency in financial reporting.

Keywords: Income Statement, Corporate Income Tax, Drafting Procedures, Fiscal Reconciliation

PENDAHULUAN

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Program ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung yang relevan dengan bidang keilmuannya, sehingga mampu memperkuat kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Melalui kegiatan magang MBKM, mahasiswa tidak hanya memperoleh pembelajaran teoritis di perguruan tinggi, tetapi juga menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi kerja nyata, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aplikatif dan kontekstual (Valentine, 2023).

Program magang MBKM menawarkan fleksibilitas kepada mahasiswa dalam menentukan jangka waktu serta bentuk kegiatan magang yang selaras dengan rencana karier masing-masing. Fleksibilitas ini mendorong pengembangan kemampuan teknis (hard skills) sekaligus kemampuan nonteknis (soft skills) seperti komunikasi, pengelolaan waktu, dan kerja sama tim. Selain itu, pengalaman magang juga memperluas jejaring profesional yang bermanfaat sebagai bekal memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, magang MBKM tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi industri dan masyarakat (Prosple, 2024).

Pelaksanaan program magang MBKM umumnya dilakukan melalui kerja sama antara perguruan tinggi dengan mitra industri, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Mahasiswa peserta program diwajibkan menyusun laporan magang serta mengikuti proses evaluasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. Kegiatan magang ini diakui sebagai bagian dari kurikulum dan dapat dikonversikan ke dalam satuan kredit semester (SKS), sehingga tidak menghambat kelancaran studi mahasiswa. Dengan pengakuan akademik tersebut, magang MBKM menjadi komponen penting dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja dan memiliki daya saing tinggi (Direktorat et al., 2024). Bagi mahasiswa Program Diploma III, magang MBKM dapat dijadikan sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi. Program ini menyediakan berbagai pilihan perusahaan maupun instansi mitra, sehingga mahasiswa memiliki keleluasaan untuk memilih tempat magang sesuai dengan minat dan kebutuhan, baik secara mandiri maupun melalui rekomendasi perguruan tinggi. Salah satu instansi mitra dalam pelaksanaan magang MBKM adalah PT Infinity General Consulting yang berlokasi di Jl. Adi Sucipto, Pertokoan Griya Pesona Rinjani No. 16A, Mataram.

PT Infinity General Consulting merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi keuangan, akuntansi, dan perpajakan. Perusahaan ini memberikan pendampingan kepada klien dalam penyusunan laporan keuangan, perencanaan pajak, serta pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai konsultan profesional, PT Infinity General Consulting berperan dalam memberikan arahan dan solusi strategis agar laporan keuangan klien disusun sesuai dengan standar akuntansi serta ketentuan fiskal yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, perusahaan ini berperan dalam melakukan penyesuaian antara laba komersial dan laba fiskal guna memastikan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dilakukan secara tepat dan efisien (Resmi, 2022).

PT Infinity General Consulting secara aktif membantu berbagai entitas usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, dalam penyusunan laporan keuangan, perencanaan pajak, serta pemenuhan kepatuhan fiskal di Indonesia. Didukung oleh tim konsultan yang kompeten dan berpengalaman, perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan layanan konsultasi yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta regulasi perpajakan terkini.

Dalam praktiknya, PT Infinity General Consulting juga menitikberatkan pada analisis dan penyusunan rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi sebagai bagian dari kewajiban perpajakan perusahaan klien. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan ketentuan fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Melalui proses ini, perusahaan membantu klien memastikan bahwa perhitungan

laba kena pajak dan PPh Badan terutang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan pajak serta meminimalkan risiko kesalahan dan sanksi perpajakan (Suandy, 2023). Adapun tujuan pelaksanaan magang ini adalah untuk mengetahui dan memahami prosedur penyusunan rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT Infinity General Consulting. Selain itu, kegiatan magang ini bertujuan untuk memahami penerapan ketentuan rekonsiliasi fiskal yang digunakan perusahaan dalam menghitung PPh Badan agar sesuai dengan peraturan perpajakan serta mendukung transparansi pelaporan keuangan.

TINJAUAN LITERATUR

Prosedur Penyusunan

Prosedur penyusunan dapat diartikan sebagai rangkaian langkah atau tahapan kerja yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk menghasilkan suatu karya tulis, laporan, atau dokumen sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks akademik, prosedur penyusunan meliputi beberapa tahapan, antara lain perencanaan, pengumpulan data, pengolahan informasi, penulisan, hingga tahap penyempurnaan laporan. Dengan adanya prosedur penyusunan yang jelas, proses penulisan menjadi lebih terarah dan efisien, sehingga hasil akhir yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Suryani & Hendri, 2021).

Tujuan utama dari prosedur penyusunan adalah untuk memastikan bahwa proses penulisan dilaksanakan secara sistematis sehingga menghasilkan karya tulis yang logis dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Dengan adanya prosedur penyusunan, mahasiswa mampu menyajikan data hasil magang secara terstruktur, melakukan analisis secara runtut, serta menarik kesimpulan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penerapan prosedur penyusunan juga berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan komunikatif mahasiswa melalui penulisan karya ilmiah (Fatimah, 2015; Suryani & Hendri, 2021).

Prosedur penyusunan memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi dan kualitas karya tulis ilmiah, khususnya dalam penyusunan laporan magang. Prosedur ini berfungsi sebagai pedoman bagi mahasiswa agar dapat menyajikan hasil kegiatan magang secara objektif dan sesuai dengan struktur laporan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan. Prosedur penyusunan mencakup aspek teknis, seperti format penulisan, gaya bahasa, dan sistem sitasi, serta aspek substansi yang meliputi urutan bab, kerangka teori, dan penyajian hasil kegiatan magang. Selain itu, penerapan prosedur penyusunan yang sistematis juga membantu meningkatkan efisiensi waktu penulisan dengan meminimalkan kesalahan teknis dan ketidakteraturan struktur. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmawati (2020) serta Yuliana dan Pratama (2022) yang menyatakan bahwa prosedur penyusunan yang baik dapat mempermudah proses revisi, mempercepat penyelesaian laporan, dan memastikan hasil akhir sesuai dengan standar akademik yang berlaku.

Menurut hendrawan;2020, prosedur penyusunan umumnya meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

- a. Aspek perencanaan, yaitu menentukan tujuan, topik, dan struktur umum dokumen yang akan disusun.
- b. Aspek pelaksanaan, yaitu proses mengumpulkan data, menulis, dan mengedit isi laporan sesuai kerangka yang telah dirancang.

- c. Aspek evaluasi dan penyempurnaan, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap isi, format, serta kesesuaian laporan dengan pedoman yang ditetapkan.

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal merupakan suatu proses penyesuaian antara laporan keuangan yang disusun secara komersial dengan laporan keuangan fiskal yang mengacu pada ketentuan perpajakan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh penghasilan kena pajak yang dihitung secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk memenuhi kebutuhan pihak internal dan eksternal, seperti manajemen, kreditur, dan investor, sedangkan laporan keuangan fiskal disusun khusus untuk kepentingan perpajakan. Perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban antara laporan komersial dan fiskal menyebabkan perlunya penyesuaian agar laba komersial dapat direkonsiliasi menjadi laba fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (DDTC, n.d.; PERTAPSI, 2020).

Menurut Pratiwi, A., & Hidayati, R (2020), ada tiga unsur penting dari proses rekonsiliasi fiskal diantaranya:

- a. Laporan laba rugi komersial, merupakan dasar dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal. Hal ini disebabkan karena Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas penghasilan yang diperoleh perusahaan, sedangkan penghasilan tersebut dicatat dan disajikan dalam laporan laba rugi. Hasil dari laporan laba rugi komersial berupa laba atau rugi perusahaan menjadi acuan awal dalam menentukan besarnya pajak yang terutang sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perpajakan.
- b. Koreksi atau penyesuaian fiskal, dilakukan apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara ketentuan akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penyusunan laporan keuangan, akuntansi menggunakan berbagai metode dan asumsi tertentu yang pada praktiknya dapat berbeda dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Perbedaan tersebut diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perbedaan temporer (beda waktu) dan perbedaan permanen (beda tetap).
- c. Laba atau rugi fiskal, merupakan hasil akhir dari proses koreksi atau penyesuaian fiskal atas penghasilan dan biaya yang terdapat dalam laporan laba rugi komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan. Laba atau rugi fiskal ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Dalam pelaksanaan rekonsiliasi fiskal, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung, seperti faktur, bukti transaksi, dan laporan keuangan, tersedia secara lengkap agar setiap koreksi fiskal yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap bentuk penyesuaian fiskal juga harus dijelaskan secara rinci dalam kertas kerja rekonsiliasi, sehingga memudahkan proses pemeriksaan oleh auditor maupun otoritas pajak. Selain itu, perusahaan dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang bersifat dinamis, mengingat perubahan regulasi dapat memengaruhi pengakuan biaya dan penghasilan sebagai pengurang atau bukan pengurang dalam perhitungan pajak (UNISTI, 2021; PERTAPSI, 2020).

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan yang berfungsi untuk menyajikan hasil kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, baik bulanan, triwulanan, maupun tahunan. Laporan ini memuat informasi mengenai pendapatan yang diperoleh, beban yang dikeluarkan, serta laba atau rugi yang dihasilkan selama periode berjalan. Melalui laporan laba rugi, pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai efektivitas perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

Selain itu, laporan laba rugi juga digunakan untuk menganalisis perkembangan kinerja keuangan dari waktu ke waktu, sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbandingan antara periode sebelumnya dengan periode berjalan (Kieso et al., 2019).

Menurut Harrison et al. (2018), laporan laba rugi terdiri dari beberapa komponen utama yang masing-masing memiliki fungsi penting, yaitu:

1. Pendapatan (revenue), yaitu seluruh penghasilan yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan.
2. Beban (expenses), yaitu semua pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan.
3. Laba kotor (gross profit), yang dihitung dari selisih antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan.
4. Laba operasi (operating income), yaitu laba yang berasal dari kegiatan inti perusahaan setelah dikurangi beban operasional.
5. Laba bersih (net income), yang merupakan hasil akhir setelah seluruh pendapatan dan beban, termasuk pajak dan biaya lain-lain, diperhitungkan.

Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Pajak Penghasilan Badan (PPh) Badan merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan selama satu tahun pajak, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. PPh Badan berlaku bagi badan usaha yang berbentuk kumpulan orang dan/atau modal yang berfungsi sebagai satu kesatuan, baik yang menjalankan usaha maupun tidak. Bentuk badan usaha tersebut meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer (CV), badan usaha milik negara, koperasi, yayasan, lembaga lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Indonesia, 2013).

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional perusahaan, kewajiban pembayaran PPh Badan harus dilaksanakan secara tepat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perhitungan PPh Badan dilakukan dengan memperhatikan seluruh penghasilan dan biaya yang diperkenankan secara fiskal, serta dikaitkan dengan kewajiban perpajakan lainnya, seperti PPh Pasal 21, 22, 23, dan 25, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan PPh Badan sangat diperlukan agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien serta meminimalkan risiko terjadinya sanksi pajak akibat kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak (Modul Bravet Praktikum Bina Muda Inspira, 2020).

Tarif Umum Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif Pajak Penghasilan Badan ditetapkan sebesar 25 persen dan berlaku hingga tahun pajak 2019. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22 persen untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta direncanakan menjadi 20 persen mulai tahun pajak 2022. Namun, ketentuan tersebut kemudian disesuaikan kembali melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menetapkan tarif umum PPh Badan sebesar 22 persen untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 31E. Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar diberikan fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif umum Pajak Penghasilan Badan sebagaimana diatur dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a). Fasilitas ini dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar, dengan tujuan untuk memberikan keringanan pajak bagi badan usaha skala kecil dan menengah.

METODE

Laporan magang ini disusun menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kegiatan magang yang dilakukan, khususnya terkait proses kerja, prosedur, dan aktivitas yang berkaitan dengan bidang akuntansi dan perpajakan. Data diperoleh melalui observasi langsung, partisipasi aktif, serta dokumentasi selama pelaksanaan magang di PT Infinity General Consulting. Kegiatan magang dilaksanakan selama empat bulan, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan 15 Desember 2025. Pelaksanaan magang mengikuti ketentuan jam kerja yang berlaku di PT Infinity General Consulting, yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 08.00–17.00 WITA. Kegiatan magang bertempat di PT Infinity General Consulting yang berlokasi di Jl. Adi Sucipto, Pertokoan Griya Pesona Rinjani No. 16A, Mataram.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalani program magang di PT Infinity General Consulting, yaitu sebagai berikut:

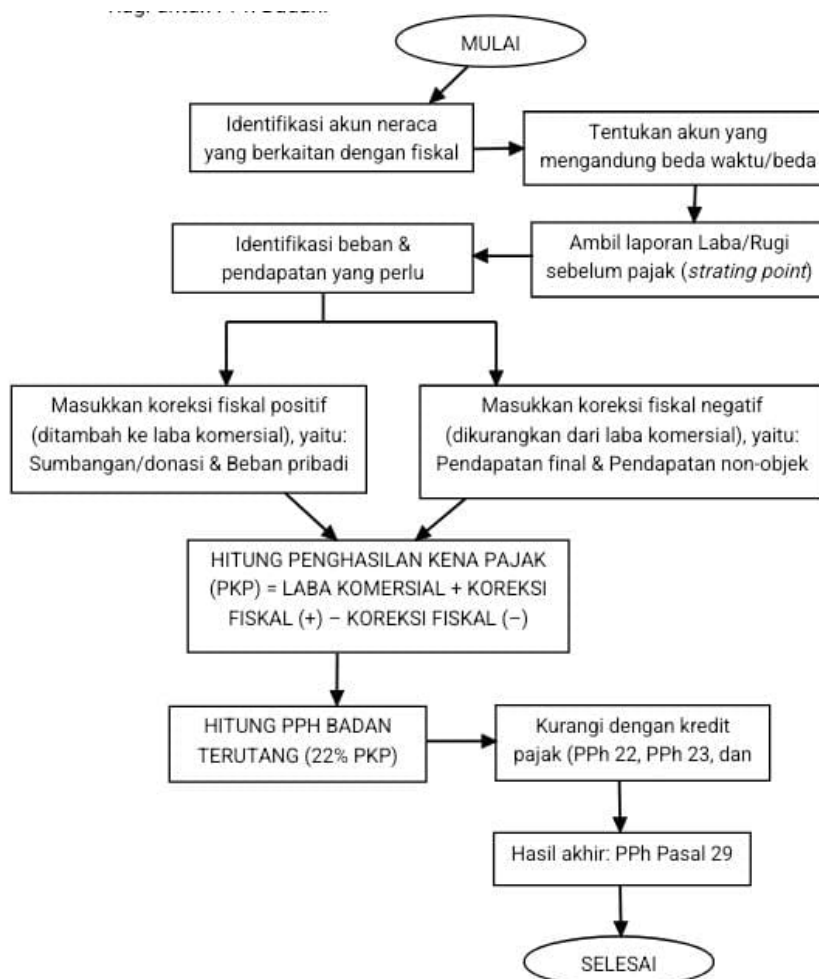
- a. Penulis melakukan pengenalan dan pihak perusahaan menjelaskan sistem prangkat lunak yang digunakan oleh PT Infinity General Consulting.
- b. Penulis beradaptasi dengan proses-proses cara kerja untuk membantu pekerjaan yang ada di PT Infinity General Consulting.
- c. Penulis membantu dalam proses penginputan mutasi bank para klien PT Infinity General Consulting.
- d. Penulis dijadwalkan untuk membantu di *Production House* klien PT Infinity General Consulting.
- e. Penulis juga membantu membuat surat kontrak untuk staf.
- f. Penulis ikut serta menghadiri rapat dengan pimpinan untuk membahas data klien dan jobdesk baru staf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Infinity General Consulting menyediakan jasa konsultasi bagi para pelaku usaha yang menghadapi tantangan dalam membangun manajemen keuangan dan pengelolaan perusahaan yang ideal, di tengah tuntutan untuk tetap fokus pada strategi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Keterbatasan waktu, kurang optimalnya eksekusi manajemen keuangan, serta pengambilan keputusan yang kurang tepat sering menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh perusahaan. Sebagai konsultan profesional, PT Infinity General Consulting hadir sebagai solusi untuk membantu perusahaan dalam mengoptimalkan manajemen keuangan dan bisnis. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan, antara lain konsultasi perpajakan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan kas, pengembangan model bisnis, branding, serta layanan pendukung lainnya. Selain membantu menyelesaikan permasalahan, PT Infinity General Consulting juga berupaya memberikan nilai tambah bagi klien agar mampu membangun bisnis secara profesional, kredibel, dan berkelanjutan, termasuk kemudahan dalam mengelola kebutuhan eksternal dan pendukung hukum perusahaan.

Proses pengolahan data keuangan perusahaan dalam rangka penyusunan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2023. Prosedur rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan mengacu pada tiga komponen utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan koreksi fiskal. Ketiga komponen tersebut disusun secara sistematis untuk menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan PPh Badan terutang yang akurat serta sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pertama, Neraca digunakan untuk mengidentifikasi posisi keuangan perusahaan pada akhir periode dengan menelaah akun-akun yang berpotensi menimbulkan perbedaan antara pencatatan komersial dan ketentuan fiskal. Selanjutnya, Laporan laba rugi menjadi dasar awal perhitungan fiskal dengan menggunakan laba sebelum pajak sebagai titik awal rekonsiliasi, di mana setiap akun pendapatan dan beban dianalisis kelayakannya secara fiskal. Terakhir, dilakukan koreksi fiskal positif dan negatif untuk menyesuaikan laba komersial hingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berdasarkan PKP tersebut, dihitung PPh Badan terutang dengan tarif 22 persen dan dikurangi kredit pajak, sehingga diperoleh posisi Pajak Penghasilan Kurang atau Lebih Bayar (PPh Pasal 29).



Gambar 1. Flowchart Prosedur Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi PPh Badan

Flowchart merupakan diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan suatu rangkaian proses secara sistematis dan terstruktur. Dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan, flowchart berfungsi untuk menjelaskan tahapan kerja yang dilakukan, mulai dari pengambilan data neraca, analisis laporan laba rugi, hingga pelaksanaan penyesuaian melalui koreksi fiskal. Penyajian proses

dalam bentuk visual dengan simbol-simbol standar, seperti terminator, proses, dan garis alur, membantu mempermudah pemahaman terhadap urutan kegiatan dalam perhitungan pajak.

Penggunaan flowchart dalam laporan magang memberikan gambaran yang jelas mengenai alur kerja penyusunan rekonsiliasi fiskal sehingga hubungan antarproses dapat dipahami secara runtut dan logis. Selain itu, flowchart memudahkan identifikasi tahapan penting, seperti penentuan laba komersial, penerapan koreksi fiskal positif dan negatif, serta perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang. Dengan demikian, flowchart berperan sebagai alat bantu visual yang mendukung kejelasan penjelasan prosedur dan memperkuat dokumentasi proses dalam laporan magang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang di PT Infinity General Consulting, dapat disimpulkan bahwa tujuan untuk memahami prosedur penyusunan rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan telah tercapai secara optimal. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tahapan rekonsiliasi fiskal, meliputi pengumpulan laporan laba rugi komersial, identifikasi perbedaan antara ketentuan akuntansi dan peraturan perpajakan, penentuan koreksi fiskal, hingga penyusunan laporan sebagai dasar perhitungan PPh Badan. Proses rekonsiliasi fiskal yang diterapkan di PT Infinity General Consulting dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga mencerminkan penerapan konsep dan teori perpajakan secara tepat dalam praktik kerja yang menuntut ketelitian, kelengkapan dokumen, serta pemahaman regulasi yang memadai.

Berdasarkan hasil pengamatan, disarankan agar PT Infinity General Consulting terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan rekonsiliasi fiskal melalui penguatan sistem dokumentasi dan penerapan digitalisasi data guna meminimalkan potensi kesalahan serta mendukung transparansi pelaporan keuangan. Selain itu, program studi diharapkan dapat memperkuat pembelajaran berbasis praktik dan studi kasus yang berkaitan dengan rekonsiliasi fiskal, Pajak Penghasilan Badan, serta penggunaan perangkat lunak akuntansi dan perpajakan untuk meningkatkan kesiapan lulusan dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja. Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang juga disarankan untuk membekali diri dengan pemahaman dasar perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kemampuan pengolahan data, serta menjaga profesionalisme dan komunikasi yang efektif selama berada di lingkungan kerja.

REFERENSI

- DDTC, Perpajakan. n.d. "Rekonsiliasi Fiskal." Retrieved November 12, 2025 (<https://perpajakan.ddtc.co.id/data-informasi/glosarium/rekonsiliasi-fiskal>).
- Fatimah, S. 2015. Manajemen Prosedur Dan Administrasi Perkantoran Modern. Bandung: Alfabeta.
- Harrison, W. T. 2018. Financial Accounting. Pearson.
- Hendrawan, R. 2020. Metodologi Penulisan Akademik: Panduan Praktis Bagi Mahasiswa. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Indonesia. 2013. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Kieso et al. 2019. Intermediate Accounting. Wiley.
- Modul Bravet Praktikum Bina Muda Inspira. 2020. PPh Badan: Panduan Dan Latihan Praktis. Yogyakarta: Bina Muda Inspira.
- PERTAPSI. 2020. "Memahami Konsep Rekonsiliasi Fiskal." Retrieved November 12, 2025 (<https://pertapsi.or.id/memahami-konsep-rekonsiliasi-fiskal>).
- Pratiwi, A., & Hidayati, R. 2024. "Rekonsiliasi Fiskal Dalam Praktik Perpajakan." Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik 12(3):215–23.
- Prosple. 2024. "8 Keuntungan Magang Kampus Merdeka Yang Wajib Kamu Ketahui!" Id.Prosple.Com. Retrieved (<https://id.prosple.com/career-planning/8-keuntungan-magang-kampus-merdeka-yang-wajib-kamu-ketahui>).

- Rahmawati, D. 2020. Pedoman Penulisan Laporan Akademik. Yogyakarta: Deepublish.
- Resmi, S. 2022. Perpajakan: Teori Dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. 2023. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryani, E. and Hendri, M. 2021. Metodologi Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Alfabeta.
- UNISTI, Jurnal. 2021. "Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pajak." Jurnal UNISTI.
- Valentine, Laurel. 2023. "Pengalaman Luar Biasa Mengikuti Program Magang MBKM 2023 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember Di Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A." Ww.kompasiana.Com. Retrieved (<https://www.kompasiana.com/laurelvalentine5770/6588363ac57afb47447e9752/pengalaman-luar-biasa-mengikuti-program-magang-mbkm-2023-mahasiswa-fakultas-hukum-universitas-jember-di-pengadilan-negeri-jember-kelas-1a>).
- Yuliana, T. and Pratama, A. 2022. Teknik Penyusunan Laporan Dan Karya Ilmiah. Jakarta: Mitra Wacana Media.